

TAJUK RENCANA

Guru Honorer dan PPPK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menilai para guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun untuk menjadi PPPK, guru honorer harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. MK menilai perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK.

Hakim konstitusi, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengungkapkan hal itu ketika membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Rabu (16/10) lalu. Pertimbangan Putusan MK tersebut berkaitan gugatan yang diajukan guru honorer salah satu sekolah swasta di Jakarta terkait Pasal 66 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Dalam permohonan tersebut, pemohon minta agar norma yang pada intinya meniadakan tenaga kerja honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN itu ditunda keberlakuannya hingga seluruh tenaga kerja honorer yang sudah bekerja sebelum UU itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik itu PPPK maupun PNS.

Mahkamah Konstitusi mengaku dapat memahami dampak dari Pasal 66 UU ASN itu, seperti guru honorer yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan karier sebagai guru. MK berharap agar penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kenyataan selama ini memang menunjukkan, banyak guru honorer tidak lolos seleksi PPPK, dengan berbagai alasan. Padahal mereka sudah lama mengabdikan sebagai guru honorer, karena sebelumnya banyak sekolah mengeluh kekurangan tenaga guru. Ketika ada kesempatan menjadi PPPK, ternyata banyak di antara

mereka yang gagal.

Berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdikan harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang waktu. MK juga menyatakan bahwa rekrutmen ASN didasarkan pada profesionalisme. Selain itu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar secara umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer. MK menganggap tenaga kerja honorer tetap berkesempatan ikut rekrutmen ASN, selama memenuhi kualifikasi dan azas profesionalitas.

MK menegaskan, lembaga atau unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database, yakni database BKN, Dapodik, dan NUPTK. Selain itu juga harus mengusulkan kebutuhan formasi dan kualifikasi. Dengan demikian akan terbuka kesempatan bagi guru honorer untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau PPPK.

Nasib guru honorer memang tidak sebaik pengabdian mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa. Melihat kondisi tersebut, mungkin dalam pemerintahan mendatang perlu kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain penerimaan CASN juga, pemerintah perlu membuka seleksi khusus PPPK untuk guru honorer dan tenaga honorer sekolah. Tentu saja guru honor dan tenaga honorer dimaksud juga benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesionalitas.

Tampaknya pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun mendatang benar-benar akan memperhatikan pendidikan, khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan membentuk kementerian tersendiri. Semoga ini juga menjadi harapan baru bagi guru honorer dan tenaga honorer kependidikan. □-d

Menyambut Pelantikan Prabowo-Gibran

Paulus Mujiran

JIKA tidak ada aral melintang, besok Minggu 20 Oktober 2024 di depan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Tentu kita bersyukur bahwa proses transisi kekuasaan dari Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Mairuf Amin kepada Prabowo-Gibran berlangsung dengan damai.

Dengan dilantiknya Prabowo-Gibran tentu agenda terdekat yang harus segera dituntaskan adalah membentuk kabinet yang benar-benar ahli dan profesional. Prabowo sudah menyiapkan para calon menteri dan wakil menteri lebih kurang 104 tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tentu jika 104 orang itu akhirnya menjadi menteri dan wakil menteri kabinet yang akan dibentuk adalah kabinet supergemuk, karena mengadopsi hampir semua partai politik pendukung.

Mampukah Prabowo-Gibran menyusun kabinet zaken alias profesional tanpa dagang sapi? Yang diperlukan saat ini adalah kabinet yang langsung bekerja. Apalagi pasangan ini mengusung jargon melanjutkan kepemimpinan Jokowi sehingga tidak terlalu lama berkonsolidasi. Keinginan mengadopsi banyak orang dalam kabinet pasti melahirkan kabinet gemuk nan yang kurang lincah. Semakin banyak meja rantai birokrasi akan lebih panjang.

Setelah menang Pilpres Prabowo-Gibran tampaknya memang dilematis dalam menyusun kabinetnya. Di satu sisi banyak pekerjaan rumah yang segera perlu diselesaikan, seperti pembangunan Ibu Kota Negara, realisasi makan siang bergizi gratis dan penuntasan pembangunan infrastruktur, yang pastinya membutuhkan anggaran tidak sedikit. Di pihak lain, harus memperhatikan keinginan dari partai-partai pengusung untuk mendudukkan orang-orangnya dalam kabinet.

Memang ada keuntungan banyak

Rapuhnya pemerintahan di era perlementer tahun 1950-an karena koalisi pragmatis tidak melahirkan dukungan bulat baik di parlemen maupun kabinet. Sistem multipartai mengandaikan adanya koalisi yang kuat. Koalisi yang kuat hanya terbentuk ketika setiap elite parpol berani menanggalkan kepentingan kelompok dan partainya demi kepentingan bangsa dan negara.

Keberadaan DPR tetap penting. Betapapun ada banyak keputusan politik seperti pengesahan undang-undang dan anggaran yang membutuhkan persetujuan DPR. Namun di saat yang sama permasalahan yang kompleks baik sosial, politik, hukum dan ekonomi membutuhkan kabinet ahli (zaken kabinet). Kalau semangatnya hanya bagi-bagi kursi bagi partai bahkan organisasi relawan pun keba-

gian, kepentingan bangsa pasti terabaikan.

Jikapun berlatar belakang parpol tetap harus seorang ahli. Pengalaman dengan kabinet transaksional berisi elite partai minus kompetensi membuat kinerja kabinet tidak maksimal. Sejarah politik Indonesia kabinet ahli hanya berjalan dari hasil Pemilu 1972, 1977, 1982, 1987 dan 1992 ketika Golkar yang menjadi penopang utama kekuasaan Soeharto selalu menang di atas 70 persen.

Memang tidak mudah bagi Prabowo-Gibran menyusun kabinet yang benar-benar profesional. Jalan tengahnya Prabowo-Gibran harus membuat prioritas. Misalnya memberikan kursi menteri 40 persen kepada partai pendukung/pengusung dan 60 persen terdiri dari orang-orang profesional. Kalau tidak hanya akan menjadi ikabinet arisanî berisi kumpulan orang namun tidak bisa bekerja. Approval rate Prabowo di kisaran 83 persen menurut survei Poltracking hendaknya menjadi modal bagi Prabowo untuk tidak tersandera partai politik.

Sekalipun ada 16 menteri Jokowi yang diperkirakan masuk kabinet Prabowo-Gibran tidak ada jaminan akan berjalan mulus karena beda komando. Inilah risiko sistem multipartai yang tidak menghasilkan pemenang mutlak dalam pemilu sehingga kita sulit menyaksikan menteri yang benar-benar ahli dalam memecahkan persoalan bangsa. Bahkan sangat mungkin Prabowo-Gibran tersandera oleh kepentingan parpol yang tidak terakomodasi di pemerintahan. □-d

*) *Paulus Mujiran, Pengamat Politik, tinggal di Semarang.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm -. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Pangghih Priyo Subagyo

tang aktivitas seksual, melainkan tentang memberikan pengetahuan yang tepat sesuai usia untuk membantu anak memahami batasan tubuh, otonomi, dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Tanpa pendidikan yang tepat, anak-anak bisa menjadi lebih rentan terhadap pelecehan seksual karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang dianggap normal atau tidak.

Pendidikan seksual sejak dini telah terbukti mengurangi risiko pelecehan dan kekerasan seksual. Dalam perspektif *Adverse Childhood Experiences* (ACE), anak-anak yang mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang seksualitas serta batasan tubuh memiliki perlindungan yang lebih baik dari predator seksual. Dengan mengetahui hak mereka atas tubuh mereka sendiri, anak-anak akan lebih berani berbicara jika mereka menghadapi situasi yang tidak nyaman atau berbahaya.

Anak-anak yang memahami batasan tubuh juga lebih mungkin melaporkan tindakan yang tidak sesuai, baik kepada orangtua maupun pihak berwenang. Hal ini penting untuk mencegah fenomena *igunung esi* di mana banyak kasus pelecehan tidak terungkap karena korban tidak menyadari bahwa mereka telah dilecehkan.

Seperti pada kasus kali ini, pelaku malah memberikan doktrin pada anak bahwa hubungan sesama jenis merupakan perilaku yang wajar. Para korban yang menerima doktrin tersebut kemudian menganggap perbuatan tersangka kepada dirinya adalah hal yang normal. Sehingga kemungkinan dari banyaknya korban yang ada, tidak ada satupun yang kemudian menceritakan ke orangtuanya.

KEMBALI kita dikejutkan dengan kasus predator seksual terhadap anak. Lebih disayangkan lagi bahwa pelakunya adalah seorang tenaga pendidik di DIY. Memang pelaku kejahatan seksual seringkali merupakan orang terdekat. Sampai sejauh ini sudah ada 22 korban di mana 9 di antaranya masih di bawah umur. Para korban selama ini tidak pernah bercerita kepada orangtua tentang kekerasan seksual yang didapatkan. Kasus ini terbongkar karena salah satu orangtua mendapati rekaman video perbuatan tersangka terhadap anaknya.

Pentingnya Pendidikan Seksual
Kejadian ini menunjukkan kepada kita bagaimana pendidikan seksual ini sangat penting bagi anak. Mungkin bagi sebagian besar orangtua pendidikan seksual bagi anak masih terlihat tabu.. Banyak orangtua merasa ragu atau khawatir bahwa pendidikan seksual di usia muda akan mendorong anak-anak untuk berpikir atau bertindak tidak sesuai dengan usia mereka. Namun, dari perspektif psikologi perkembangan, pendidikan seksual sejak dini justru memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman yang sehat dan bertanggung jawab terhadap tubuh, hubungan, dan seksualitas.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, anak-anak sedang berada pada tahap eksplorasi dan pembentukan pemahaman tentang diri mereka. Pada usia ini, mereka mulai mengenal bagian tubuh dan fungsinya, serta belajar memahami batasan. Teori *Attachment Theory* yang dikembangkan oleh John Bowlby menekankan bahwa hubungan aman dan terbuka antara anak dan orangtua dapat mendukung perkembangan emosional yang sehat. Dengan demikian, pendidikan seksual yang diberikan dalam lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang memungkinkan anak untuk mengenal tubuh mereka dan memahami batasan pribadi, belajar konsep “sentuhan baik” dan “sentuhan buruk” untuk melindungi diri dari pelecehan seksual.

Pendidikan seksual ini bukan ten-

Perlunya Pendampingan Korban

Pendampingan psikologis diperlukan bagi korban kejahatan seksual untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Trauma ini, terutama jika terjadi pada anak-anak, dapat mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, dunia di sekitar mereka, dan hubungan interpersonal. Berdasarkan teori trauma yang dikembangkan oleh Judith Herman, trauma kekerasan seksual menempatkan korban dalam situasi kehilangan kontrol dan rasa aman, serta meninggalkan luka psikologis yang mendalam.

Pendampingan bagi korban kejahatan seksual harus bertujuan untuk membangun kembali rasa aman. Dukungan emosional dari konselor, terapis, dan komunitas dapat membantu korban merasa didukung dan tidak sendirian. Lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang memainkan peran penting dalam proses pemulihan, terutama bagi anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan psikologis. □-d

*) *Pangghih Priyo Subagyo, Mahasiswa Magister Psikologi Sosial UGM.*

Pojok KR

Hari Minggu besok dijadwalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

-- Semoga lancar aman. ***

Menteri Pertanian Andi Amran mencopot dua pejabat yang minta komisi proyek.

-- Copot dan pecat! ***

Taman Budaya Yogyakarta kembali menggelar Parade Teater Linimasa.

-- Layak ditonton.

Berabe